

Kinerja Perusahaan Daerah Cita Waya Esa Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar 54 Amurang

Keren V.R. Tampanguma¹
Frans Singkoh²
Sofia E. Pangemanan³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Mengapa kinerja Perusahaan Daerah Cita Waya Esa dalam pengelolaan retribusi Pasar 54 Amurang belum optimal. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil yang dihasilkan oleh individu melalui proses dari organisasi atau perusahaan yang dapat diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individu, variabel psikologi dan variabel organisasi. Pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Kebijakan retribusi pasar tersebut tidak dikeluarkan begitu saja karena retribusi ini diikat oleh undang-undang dan peraturan daerah setempat. Penelitian ini berlokasi di Perusahaan daerah Cita Waya Esa Amurang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan retribusi pasar 54 Amurang belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan, Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki, sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi pasar,

Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Daerah, Retribusi Pasar

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Otonomi Daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang di miliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Menurut Sarundajang (2003:74) otonomi pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya yang lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, dan suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Pelaksanaan tugas ekonomi, harus memperhatikan beberapa faktor/syarat. Riwu Kaho (2003:65) beranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- 1) Manusia pelaksanaannya harus baik
- 2) Keuangan harus cukup dan baik
- 3) Perelataannya harus cukup dan baik
- 4) Organisasi dan menejemennya harus baik

Berdasarkan keempat faktor di atas otonomi daerah di harapkan dapat menjadi sarana kebijakan yang akan tetap mempersatukan masyarakat setempat pada khususnya dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah masyarakat harus di perlakukan secara wajar sesuai dengan peraturan.

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola

hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengelolaan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan dan tatanan pembangunan pasar sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan.

Fungsi Pengendalian merupakan bagian erat dari Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan pemerintahan dengan memperhatikan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah membentuk PD Pasar Cita Waya Esa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengelola Pasar yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat yang menjalankan usaha

di pasar kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pasar merupakan fasilitas utama yang diharapkan oleh petani dan masyarakat umumnya untuk menjual hasil pertanian dan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa bahan pokok.

Pada observasi yang dilakukan peneliti melihat aktivitas pengelolaan pasar 54 Amurang banyak mengalami keluhan sehingga berimbas pada keengganan masyarakat dalam hal ini pedagang untuk membayar retribusi pasar dalam hal ini Bea untuk berdagang dan bea Kebersihan. Menurut Direktur Operasional Perusahaan Daerah Cita Waya Esa target pendapatan yang ingin dicapai perharinya yaitu RP.1.800.000, tetapi target yang ditentukan perharinya tidak selalu dicapai. Di Pasar 54 Amurang masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pedagang. Kondisi-kondisi yang ada di pasar 54 Amurang saat ini adalah; masih kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah, daya tampung pedagang yang tidak memadai, menurunnya omset penjualan pedagang akibat adanya pandemi covid-19, Selain itu ada pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis karena sebagian lapak dipindahkan ketempat yang kurang pengunjung maka sebagian pedagang merasa risi dikarenakan jalur penjualannya tidak ramai dikunjungi sehingga penghasilannya mengurang. Kondisi-

kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini PD Pasar Cita Waya Esa untuk mewujudkan pasar 54 Amurang lebih memadai dan menjadi pilihan bagi penjual maupun pembeli. Namun demikian pengelolaan retribusi itupun harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan, karena sekarang ini masyarakat lebih kritis untuk menilai berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil retribusi yang telah mereka bayarkan.

Tinjauan Pustaka **Konsep Kinerja Organisasi**

Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. (Sobandi, 2006:176).

Menurut Indra Bastian (2001:329), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah.

Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa: "Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu" (Hasibuan, 2001:34)

Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk

mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan.

Konsep Pengelolaan.

Menurut Moekijat “menyatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan” (Zain,2007: 21).

Pendapat Menurut Soekanto (2007:51), “mengartikan bahwa pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan”.

Menurut Halim (2012:24) Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan”.

Menurut George Terry (Hasibuan,2006) “pengelolaan atau manajemen merupakan suatu kegiatan yang menyangkut :

1. Perencanaan (*Planning*), yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*organization*) merupakan sebagai cara mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. pelaksanaan (*Actuating*) yaitu proses tindakan yang dilakukan sesuai dengan keputusan dari atas maupun keputusan bersama, kemudian sesuai dengan pengorganisaian kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu proses pengamatan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua berjalan sesuai rencana yang ditentukan sehingga menghindari penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah besar atau pemborosan dalam berbagai bentuk dan membuat tujuan tidak tercapai.

Retribusi Pasar

Menurut Sugianto (2008: 46) pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksana pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang di hasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak

swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Menurut Baban Sobandi bahwa Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. (Sobandi, 2006:176).

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi mengenai fokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut.

1. Pejabat Kantor PD Cita Waya Esa
2. Petugas pemungut retribusi pasar Cabang Dinas Pasar 54 Amurang.
3. Pedagang Pasar 54 Amurang (2 orang).
4. Masyarakat (2 orang).

Hasil Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah di olah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Data kualitatif di peroleh melalui observasi, wawancara mendalam, kajian pustaka serta study dokumentasi yang sesuai

dengan fokus penelitian. Data kualitatif tersebut dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Berikut Hasil Penelitian yang diperoleh Peneliti :

Informan 1 inisial RR (Pejabat kantor perusahaan daerah Cita Waya Esa) ditanya mengenai pertanyaan pertama yaitu, apa target dan sasaran dari perusahaan daerah Cita Waya Esa dalam pengelolaan retribusi pasar 54 amurang? *“Target yaitu menopang pendapatan asli daerah sekaligus pemberdayaan ekonomi pasar 54 Amurang, sedangkan sasarannya adalah para pelaku usaha (para pedagang) untuk menggerakkan ekonomi masyarakat”*. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana rencana kedepan dari Perusahaan Daerah Cita Waya Esa ? *“ Rencana kedepan pasar 54 Amurang akan direlokasikan ke tempat yang lebih representative agar supaya pedagang dapat tertampung dan ditata lebih baik”*.

Pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimana pengelolaan retribusi pasar 54 amurang? *“Pengelolaan retribusi pasar 54 Amurang yaitu dipungut oleh petugas pasar (mandor) kepada setiap pedagang retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, selanjutnya diteruskan kerekening bank atas nama Perusahaan Daerah Cita Waya Esa”*.

Informan 2 inisial RS (Petugas pemungut retribusi pasar Cabang Dinas Pasar 54 Amurang) ditanya mengenai, Apa saja hambatan yang dihadapi Perusahaan Daerah Cita Waya Esa dalam pengelolaan retribusi di pasar 54 amurang? *“Hambatan yang dihadapi masih banyak pedagang yang belum sadar akan kewajiban membayar retribusi (retribusi pasar dan kebersihan)”*.

Informan 3 inisial JL (pedagang pasar) ditanya mengenai, Bagaimana kondisi pasar 54 amurang saat ini? Apakah ada permasalahan – permasalahan yang dihadapi ? *"kondisi saat ini aktivitas pasar berjalan seperti biasa (setiap hari) dan kendalanya adalah :*

1. *Daya tampung pedagang pasar 54 amurang tidak memadai*
2. *Aksen jalan ditengah pasar belum tertata baik (infrastruktur)*
3. *Lahan dari pasar tidak semua milik Pemerintah kabupaten".*

Informan 4 inisial MW (pedagang pasar) ditanya mengenai, apakah ada perlindungan terhadap pedagang? *" Bentuk perlindungan perusahaan daerah cita waya esa menempatkan pedagang sesuai sonasi dagangan yang ada".*

Informan 5 inisial AT (masyarakat) ditanya mengenai, Menurut anda bagaimana kondisi keberadaan pasar 54 Amurang saat ini? *" keberadaan pasar 54 Amurang saat ini tidak lagi memadai. Palsanya, keberadaan pasar tersebut seiring Amurang sebagai Ibukota Kabupaten Minahasa Selatan terlihat tidak cocok lagi. Dengan demikian, warga mengusulkan sebaiknya pasar direlokasikan.*

Informan 6 inisial MM (masyarakat) Ditanya mengenai, Menurut anda bagaimana kondisi pasar 54 Amurang saat ini? *" Sampai saat ini Kondisi pasar 54 Amurang sangat memprihatinkan, mulai dari sampah yang berserakan maupun lalu lintas yang kacau dikarenakan para pedagang kaki lima berjualan tidak teratur".*

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas penelitian yang berjudul "Kinerja Perusahaan Daerah Cita Waya Esa dalam Pengelolaan Retribusi pasar 54 Amurang" dengan menggunakan Teori Menurut Menurut Baban Sobandi bahwa Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.

Berdasarkan teori diatas Pengelolaan retribusi 54 Amurang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan serta sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan Kinerja Perusahaan Daerah Cita Waya Esa dalam Pengelolaan retribusi pasar 54 Amurang belum optimal yaitu :

1. Faktor Internal.
 - 1) Masih ada para pedagang yang belum sadar akan kewajiban membayar retribusi.
 - 2) Daya tampung pedagang pasar 54 Amurang tidak memadai
 - 3) Lahan dari pasar tidak semua milik Pemerintah Kabupaten.
 - 4) Akses jalan di tengah pasar belum tertata baik (infrastruktur)
 - 5) Kurangnya frekuensi penyapuan/pembersihan sampah.
 - 6) Menurunnya omset penjualan pedagang akibat adanya pandemic Covid-19.
 - 7) Letak kios pedagang yang tidak strategis.
 - 8) Sumber daya manusia (toilet, air, tempat sampah, selokan)
2. Faktor Eksternal
 - 1) Masyarakat (pengunjung)

Pengelolaan Retribusi dipungut oleh petugas pasar (mandor) kepada setiap pedagang retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Nomor 5 Tahun 2019 selanjutnya setelah selesai penagihan disetor kepada kepala pasar untuk selanjutnya diteruskan kerekening Bank Atas nama Perusahaan Daerah Cita Waya Esa.

Penentuan fasilitas pasar, Penyediaan fasilitas ini dibantu oleh dinas-dinas terkait dan aparat lapangan serta diharapkan dapat membantu pedagang dalam berjualan. Khusus dipasar 54 Amurang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu berupa kios, los, pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola pemerintah. Penentuan tarif retribusi yaitu menentukan tarif retribusi tidak begitu saja, sebelum menentukan tarif retribusi instansi tersebut mengadakan studi lapangan terhadap kelayakan fasilitas yang digunakan oleh pedagang pasar seperti kios, los dan pelataran pasar tersebut, tarif retribusi yang dibebankan oleh pedagang sudah diatur oleh perusahaan daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang dapat diketahui bahwa yang menjadi pembeda sebelum perencanaan ini dibuat dengan setelah adanya perencanaan seperti ini yaitu aparatur bekerja sesuai dengan payung hukum yang berlaku dan dengan adanya tarif retribusi yang jelas memudahkan aparatur dalam mengelolah retribusi tersebut, tetapi dibagian fasilitas masih banyak yang belum lengkap serta masih perlu perbaikan dalam pembangunan.

Perusahaan Daerah Cita Waya Esa memiliki Target Menopang pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah sekaligus pemberdayaan ekonomi

pasar 54 Amurang sedangkan sasarannya adalah para pelaku usaha (para pedagang) untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Adapaun Rencana kedepan dari Perusahaan daerah Cita Waya Esa dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu untuk Merelokasikan pasar 54 Amurang ke tempat yang lebih respresentatif agar supaya pedagang dapat tertampung dan tertata dengan baik agar tidak ada kericuan yang dialami.

Adapun tagihan Bea dan Kebersihan yaitu :

1.) Bea perhari : Rp. 5.000

2.) Kebersihan perhari : Rp. 3.000

Sehingga target yang ingin dicapai perharinya yaitu Rp. 1.800.00 tetapi target yang ditentukan tidak selalu bisa dicapai karena masih banyak pedagang yang belum sadar akan kewajiban retribusi.

Penutup

Kesimpulan

1. Pengelolaan retribusi pasar 54 Amurang berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.
2. Berdasarkan hasil penelitian Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki, sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target

penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu sampai saat ini belum terbentuk badan pengawas, serta kurangnya kesadaran pedagang, kurangnya fasilitas tempat parkir dan penataan pasar yang buruk serta kurangnya pembersihan dalam pasar.

Saran

1. Pengelolaan retribusi pasar kedepannya harus lebih maksimal sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. pendataan wajib retribusi harus lebih intensif sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai target retribusi pasar.
2. Soal faktor penghambat peneliti menyarankan agar membentuk badan pengawas agar bisa melakukan pengawasan di pasar 54 Amurang serta bagi kepala pengelola retribusi selalu memperhatikan kondisi pasar sehingga tidak menimbulkan faktor penghambat lainnya.

Daftar Pustaka

A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.

Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. (hlm. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

Burhanuddin, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003)

Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah, Dkk. Jakarta: UI Press.

Hamid, Dedi dan Soeaida, Sholeh. *Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 dan Pajak Daerah peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001*. Jakarta: Asoka Dikta, Darut Bahagia.

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)

Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008)

Kaho, Josef, Riwo. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahmud, M. Dimiyati. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Jak.

Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Maria, K., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN*

- DAERAH KOTA
TOMOHOH. *JURNAL
EKSEKUTIF*, 2(5).
- Marihot Palaha Siahaan, *Pajak
Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mathis.L.Robert dan
Jackson.H.John. 2001,
*Manajemen Sumber Daya
Manusia*, Jakarta : Buku
kedua.
- Sarundajang, S.H. 2003. *Birokrasi
dalam Otonomi Daerah;
Upaya mengatasi
kegagalannya*. Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas
Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah
Dalam Negara Kesatuan*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar